

# TIONGHOA, INTEGRASI NASIONAL, dan EKONOMI POLITIK

— Menanggapi dan melengkapi tulisan Dewan Pakar INTI Hery Hariyanto Azumi "Tionghoa dan Integrasi Nasional". — Setro

Secara sederhana saya melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh penulis adalah Normatif dan umum, sebuah pandangan atau petuah yg sudah biasa disampaikan pada masyarakat umum, tidak ada pikiran dan konsep baru yang jelas akan sebuah solusi terhadap "masalah Tionghoa" di Indonesia.

Hasil survey Saiful Mujani sudah di release secara luas di media mainstream, baik koran maupun tv, namun berita hasil survey tsb seperti angin lalu tidak mendapat respon yg jelas dari publik, dalam arti kata hasil survey tsb tidak punya pengaruh apapun terhadap situasi politik yg sedang berkembang di tanah air, padahal pada umumnya survey dibuat dgn tujuan agar hasil survey dijadikan acuan dan rujukan sikap publik.

Memang bisa dipertanyakan validitas dari hasil survey tsb, karena dalam melakukan survey, pertanyaan yg harus dijawab responden bisa dirancang oleh penyelenggara survey, menampilkan pilihan yang cenderung dianggap lebih pokok dalam norma masyarakat, dapat membuat yang kalah pokok akan mendapatkan prosentase lebih kecil.

Dalam hal ini isu sentimen kebencian terhadap "etnis Tionghoa" disandingkan dgn isu :

- ISIS
- LGBT, homo seksual dan sejenisnya.
- PKI
- Yahudi

Keempat isu ini adalah isu yg selalu paling sensitif dalam norma pandangan masyarakat Indonesia, yang dihujat dan ditolak dalam masyarakat Indonesia, disandingkan dgn empat isu ini, isu sentimen kebencian terhadap "etnis Tionghoa" menjadi kalah seksi.

Selain itu apa relevansinya isu kebencian terhadap etnis Tionghoa dengan empat pilihan isu diatas? Menempatkan pilihan isu yang bukan pokok material hanya akan menjadikan tujuan survey menjadi bias!

Beda apabila sentimen "kebencian terhadap etnis Tionghoa" disandingkan dengan isu korupsi atau "pejabat korup", barangkali akan memberikan hasil survey yang berbeda.

PP-10 era bung Karno dan penindasan sosial rezim Soeharto terhadap etnis Tionghoa adalah isu masa lalu, tidak lagi bermakna kekinian. Hanya berguna untuk cermin dan evaluasi dalam mengambil kebijakan.

Selanjutnya survey yg dilakukan ISEAS bersama LSI menempatkan Tionghoa sebagai memiliki talenta dalam bisnis, dgn skor 68.1%.

Etnis Tionghoa memiliki talenta bisnis adalah hal yg sudah menjadi pengakuan umum, tidak membutuhkan survey untuk menyimpulkan hal itu.

Talenta bisnis etnik Tionghoa terbentuk oleh sejarah panjang dari peradaban ribuan tahun nenek moyang mereka dari negeri China.

Seperti ditulis oleh sejarawan China, sejak sepuluh abad lebih sebelum Masehi, setiap perang antar dinasti dan setiap pergantian Kekaisaran di China selalu terjadi peperangan yang makan korban hingga 30% dari populasi penduduknya, kehancuran akibat perang selalu membuat rakyatnya jatuh dalam jurang kemiskinan dan kemelaratan yang dalam.

Sejarah China mencatat siklus terjadinya gejolak pergantian kekaisaran selalu akan terjadi dalam kurun waktu 200-300 tahun sekali, setiap siklus gejolak pergantian kekaisaran kembali membawa korban 10-30% populasi penduduk dan menyeret kembali rakyat kedalam jurang kemiskinan dan kemelaratan, keadaan demikian membuat rakyat China harus menjadi pekerja keras, rajin, hemat, dan menabung, agar anak cucunya tidak hidup sengsara saat terjadi gejolak baik dari dynasty local maupun kekaisaran.

Sifat kerja keras, rajin, hemat dan menabung ini mengendap menjadi budaya orang China secara turun menurun.

Sistem ujian negara (confusianisme) diberlakukan untuk menjaring calon2 pemimpin dan birokrat kekaisaran, yang diadakan dan berlangsung tanpa putus sejak dynasty kekaisaran Han tahun 200SM hingga dynasty kekaisaran terakhir China tahun 1911.

Sistem ujian negara ini menciptakan tradisi mementingkan pendidikan bagi rakyat China, karena dengan kemampuan lulus ujian negara tsb orang akan menjadi bagian elit yang terhormat dan hidup penuh kemakmuran.

Jalan hidup Kerja keras, rajin, hemat, menabung, dan jalan hidup mencapai pendidikan tinggi menjadi budaya rakyat China untuk mencapai kemakmuran. Budaya ingin hidup makmur ini terbentuk dalam rentang waktu ribuan tahun.

Maka menjadi tidak heran saat belunggu sistem Komunisme lama dibongkar oleh Reformasi dan Keterbukaan yang dipimpin oleh Deng Xiaoping, dan diberlakukan ekonomi pasar, membuat energy rakyat China terbebas dan meledak---energy kerja keras, rajin,

hemat, dan menabung mendapat ruang berkembang di-tengah-2 ekonomi pasar yang dilahirkan oleh reformasi dan keterbukaan China, terutama energy kerja keras mengejar uang, bagi orang China uang adalah kemakmuran, pekerja2 China yang ditawarkan kerja diluar negeri mesti tanya ada peluang banyak untuk kerja lembur tidak, bila tidak ada merekapun menolak bekerja keluar negeri, karena kerja lembur berarti mendapat upah yang berlipat, itulah karakter budaya dan semangat mereka mencari uang menuju kemakmuran.

Maka setelah China masuk era Reformasi keterbukaan dan era ekonomi pasar, hanya dalam jangka waktu 30 tahun etos kerja China bisa menciptakan "Keajaiban China", suatu Keajaiban Prestasi Pembangunan Ekonomi yang belum pernah terjadi didunia, seperti ditulis oleh John Naisbit dalam bukunya "China's Megatrends".

Dan menjadi tidak heran pula kalau saat ini China menjadi negara dengan dana penabung rakyat terbesar didunia.

Budaya kerja keras, rajin, hemat, dan menabung inilah yang melekat pada imigran2 etnis China diseluruh dunia, termasuk imigran China yang masuk ke Indonesia.

Mengenai index Gini, index gini Indonesia belum pernah mencapai 0.5, tahun2 akhir ini index gini Indonesia dikisaran 0.4, dan 2017 ini antara 0.393 - 0.394. Artinya 1% penduduk menguasai 40% kekayaan populasi.

Penulis benar, ada masalah Ekonomi Politik dinegeri ini, yg membuat sentimen anti Tionghoa selalu dimunculkan, dan menurut penulis hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain :

#### **Pertama, Faktor Kecemburuan Ekonomi:**

Kelompok Tionghoa dianggap telah melakukan monopoli segala bentuk perdagangan dan sumber daya alam Indonesia, mengingat 1% penduduk di Indonesia menguasai 40% kekayaan populasi. Dan 1% itu didominasi kelompok Tionghoa.

#### **Kedua, Faktor politik:**

Gerakan anti Tionghoa sengaja dimunculkan untuk memperkeruh suasana dan membuat citra pemerintah buruk, bahkan untuk meledakkan sentimen anti Tionghoa.

Penulis juga mengemukakan, dikalangan Tionghoa sebagian masih ada yg secara sengaja menjaga jarak dengan warga Indonesia pada umumnya, begitu pula dengan warga Indonesia pada umumnya, sebagian besar masih menganggap kalangan Tionghoa adalah pihak lain dinegeri ini.

Disisi lain adanya sebagian masyarakat Indonesia belum legowo dipimpin oleh etnis Tionghoa juga menjadi faktor mengapa sentimen rasial itu masih menyeruak. Hal ini menurut penulis tercermin pada Ahok saat berlangsung Pilgub DKI.

## **INTEGRASI NASIONAL**

Untuk mengatasi sentimen kebencian terhadap etnis Tionghoa yg selalu muncul dari waktu ke-waktu, penulis mengajukan dan menyarankan solusi "Integrasi Nasional".

Penulis menyebutkan sederetan nama beken seperti John Lie, Soe Hok Gie, dll, sebagai teladan contoh "integrasi".

Sejarah memang menunjukkan bahwa dari zaman ke zaman selalu lahir Elemen Aktif dari masyarakat Tionghoa Indonesia yg penuh dedikasi berjuang untuk negeri dan tanah air ini. Nama-nama tsb adalah anak-anak zaman, yg dilahirkan oleh zaman, dan etnis Tionghoa Indonesia adalah bagian dari anak bangsa Indonesia di zaman yg sedang berkembang itu.

Namun, semua itu tidak pernah bisa mengurangi sentimen anti Tionghoa di Indonesia.

Terlepas dari semua persoalan politik yg mendera bangsa dan negeri ini, sepanjang zaman kita selalu menghormati deretan nama2 Tionghoa Indonesia yg disebut itu dengan setulus hati, atas dedikasi dan perjuangan mereka, kepeloporan mereka, jasa2 mereka, sumbangsih mereka, pada bangsa dan negeri ini.

Penulis juga memberi contoh integrasi dari RS Apung Dr.Lie Dharmawan, INTI (Perkumpulan Indonesia Tionghoa), Budha Tzu Chi, PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).

Dr. Lie Dharmawan dan Budha Tzu Chi adalah contoh dedikasi dari Idealisme Pengabdian, bersifat idealisme Foluntir dan Filantrop, Humanis.

Sejak dulu banyak dokter2 etnis Tionghoa di berbagai kota, terlalu banyak untuk disebut satu persatu, mereka adalah pahlawan tanpa nama, yang memiliki idealisme dan dedikasi seperti Dr. Lie Dharmawan.

PITI adalah wadah atau organisasi dari etnis Tionghoa Indonesia yang memeluk agama Islam, kesamaan agama dengan mayoritas rakyat Indonesia membuat integrasi sosial PITI dengan keseluruhan masyarakat Indonesia berlangsung mulus dan baik.

Namun, kita juga melihat semua ini tidak pernah bisa mengurangi sentimen anti Tionghoa di Indonesia.

Terlepas dari itu semua, kita sangat menghormati dan mengapresiasi, mengacung jempol untuk RS Apung Dr.Lie Dharmawan, Budha Tzu Chi, dan PITI.

Lantas apakah etnis Tionghoa harus menjadi lebih "pribumi" dulu dari pada pribumi, baru layak untuk tidak disebut sebagai "non pribumi"? Sementara ada berapa banyak pribumi yang memiliki idealisme pengabdian seperti deretan nama2 itu?

INTI yg dilahirkan di era reformasi, dipelopori oleh tokoh2 Tionghoa Indonesia dengan visi dan misi memperjuangkan hak2 Tionghoa Indonesia sebagai Warga Negara, ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berjuang menegakkan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun berapa tahun akhir ini tampaknya INTI mengalami degradasi dan demoralisasi integritas, menjadi galau dan kehilangan arah terutama disaat kondisi politik tanah air dilanda gerakan anti Tionghoa secara besar2an dan luar biasa, yg berlangsung secara TSM, Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Kita mengharap ada evaluasi dan interopeksi dari internal INTI.

Bagaimana peran INTI dalam Integrasi Nasional? kita semua akan menunggu, dan saat ini terlalu pagi untuk menilai, berhasillah INTI mewujudkan visi dan misinya.

Kemudian bagaimana kita harus melakukan Integrasi Nasional? Bagaimana konsep melakukan Integrasi Nasional? Tampaknya penulis masih terbelenggu oleh paradigma normatif, paradigma status quo.

Integrasi adalah proses membuat yang berbeda-beda menjadi satu, satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Bicara soal integrasi nasional khususnya integrasi dari kelompok etnis Tionghoa Indonesia kedalam satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan bulat, berarti harus bicara tentang INTEGRASI EKONOMI secara utuh dan menyeluruh.

Ekonomi adalah basis bangunan dasar kehidupan masyarakat, maka hubungan ekonomi akan menentukan semua corak hubungan sosial masyarakat di atasnya, corak hubungan sosial masyarakat yang dipenuhi dengan kontradiksi ekonomi tidak mungkin melahirkan kehidupan masyarakat yang harmoni, inilah AKAR MASALAH terjadinya "masalah Tionghoa" di Indonesia selama ini. Kita telah menyaksikan selama satu abad hubungan ekonomi yang diwarnai kontradiksi terus menerus, dan telah melahirkan akumulasi ketidakpuasan sosial, yang berkembang menjadi kecemburuan ekonomi, kecemburuan ekonomi otomatis menjadi ketidaksukaan terhadap etnis Tionghoa, yang berkembang menjadi sentimen bersifat rasial.

Karena ketidakmampuan elit politik dan elit bangsa dalam menyelesaikan kontradiksi sosial yang berbasis ekonomi ini, maka kondisi sosial yang merupakan puncak gunung es tersebut dipelihara, dieksplorasi dan dieksploitasi oleh elit-2 politik kelompok tertentu, yang pada moment politik tertentu bisa dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan politiknya, bahkan Soeharto mengeksplorasi menggunakannya sebagai alat untuk kepentingan ekonomi dan politik sekaligus, untuk kepentingan ekonomi pribadi dan keluarganya, serta kroni2nya.

Warisan sejarah yang dimulai ratusan tahun lalu, dimana kebencian terhadap etnis Tionghoa yang sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang dibikin oleh penguasa Belanda dan Jawa (sultan2), berkembang di era Indonesia modern, yang diawali dari persaingan dagang menjadi kecemburuan ekonomi, berkembang menjadi masalah ekonomi politik, berkembang menjadi masalah yang selalu dieksploitir oleh kepentingan2 kelompok politik, inilah yang disebut atau menjadi "masalah Tionghoa" di Indonesia selama ini.

## **TIONGHOA DAN AKUMULASI KAPITAL**

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa rata2 pedagang etnis Tionghoa memiliki budaya dan etos Kerja keras, rajin, hidup hemat dan pandai menabung, mereka terbiasa membuka warung atau toko mulai jam 7.00 pagi hingga jam 10.00 malam, dengan setia melayani konsumen pembeli. Maka tidak heran jika 20 tahun bekerja keras mereka pun bisa berhasil melakukan akumulasi modal dan hidupnya sejahtera.

Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa pangkal hidup hemat, rajin, kerja keras, menabung, akhirnya melahirkan pengusaha2 mapan.

Selain itu juga terdapat dua hal yang membuat pengusaha etnis Tionghoa menjadi lebih mudah berhasil, yaitu pengusaha Tionghoa memiliki Kepercayaan dan Jaringan Distribusi Usaha, serta penguasaan fak atas jenis barang dagangan, yang merupakan Software dan Hardware yang sekaligus dimiliki oleh pengusaha etnis Tionghoa secara turun temurun, Jaringan distribusi tersebut meliputi Jaringan yang mencapai Singapore dan Hongkong, yang merupakan bagian dari Jaringan internasional, jaringan perdagangan import export ke Singapore, Hongkong bahkan sampai ke Eropa dan AS sudah turun temurun dimiliki oleh pengusaha importir dan exportir dari etnis Tionghoa, hal ini tidak dimiliki oleh pengusaha pribumi. Namun demikian, bila pengusaha pribumi mau belajar dan bisa masuk kedalam Jaringan tsb, mereka juga akan menikmati "roti" hasil usaha tsb, bahkan menjadi bagian dari Jaringan usaha tsb.

Terlalu banyak contoh kisah sukses pengusaha besar etnis Tionghoa yang asalnya hanya berdagang kecil2an, termasuk Mayapada Grup Dato Thahir asal Surabaya yang orang tuanya hanya usaha menyewakan becak.

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional yang pesat dibawah rezim liberalisasi ekonomi, akumulasi kapital dari kelompok pengusaha yang sudah mapan pun menjadi sangat pesat, ini adalah hukum ekonomi pasar, adalah keniscayaan dari hukum ekonomi pasar yang bersifat kapitalistik, terutama sejak rezim Soeharto menganut mazhab liberalisasi, Pertumbuhan ekonomi, serta developmentalisme, yang memang sedang menjadi model dan arus ideologi pembangunan yang dianut negara2 didunia untuk mengejar tercapainya kemakmuran masyarakat secara cepat.

Rezim liberalisasi dan pertumbuhan ekonomi, serta developmentalisme merupakan ladang subur serta memberi ruang yang sangat luas bagi kelompok yang memiliki entrepreneursip kuat dan pengusaha2 yang sudah mapan, terutama pengusaha2 besar, untuk mengisi pembangunan ekonomi nasional dengan pembangunan industrialisasi disemua bidang, serta sektor jasa, keuangan, dan perbankan dll.

Posisi dan peran para entrepreneur serta pengusaha besar adalah sebagai motor atau mesin penggerak ekonomi, mereka menempati posisi yang vital dan menentukan dalam proses mencapai keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Dan tidak dipungkiri bahwa kelompok pengusaha etnis Tionghoa menempati posisi utama dalam proses pembangunan ekonomi nasional, maka kue pembangunan ekonomi nasional pun banyak dinikmati oleh kelompok etnis Tionghoa, sesuai peran, jasa, dan sumbangsih mereka dalam mengembangkan industrialisasi terutama pembangunan industri sektor Riil yang menjadi tumpuan industri dan perekonomian nasional.

Model mazhab liberalisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, selain melahirkan kemakmuran, melahirkan pengusaha2 besar dan klas menengah, namun juga sekaligus melahirkan saudara kembar berupa kesenjangan ekonomi.

Jatuhnya rezim Soeharto dan masuknya IMF membuat struktur ekonomi Indonesia memasuki era Fundamentalisme Pasar secara sempurna, maka kekuatan kapital baik kapital global maupun kapital dalam negeri menjadi sangat berkembang dan menentukan dalam struktur perekonomian nasional Indonesia.

Disisi lain keberhasilan dari kerja keras pengusaha etnis Tionghoa dalam kurun waktu yang panjang dengan kemampuan akumulasi kapitalnya, dan dalam jumlah populasi pengusaha etnis Tionghoa yang cukup signifikan dalam dunia usaha, juga menghasilkan produk masalah struktur Ekonomi Politik yang tidak berimbang, Walaupun keberhasilan pengusaha etnis Tionghoa adalah hasil kerja keras mereka, namun lahirnya masalah dalam

struktur ekonomi politik sebagai konsekuensi dari pembangunan, adalah merupakan hal yang harus dipikirkan bersama tanpa mempolitikisirkan keadaan, karena kondisi ini timbul sebagai konsekuensi produk dari ideologi pembangunan yang dianut dan dilaksanakan oleh negara, dengan bimbingan dan monitoring dari Bank Dunia, IMF, ADB, serta lembaga2 Internasional yang kompeten.

## **EKONOMI POLITIK DAN REDISTRIBUSI KEKAYAAN**

Kita semua mengakui, bahwa ada masalah yg tidak beres dengan perkembangan Ekonomi Politik di negeri ini, masalah Ekonomi Politik yang dilahirkan oleh proses pembangunan ekonomi nasional yang menitikberatkan dan fokus mengejar pertumbuhan ekonomi, atau "pertumbuhanisme" / "GDP-isme". Ada Kesenjangan Ekonomi yg makin melebar, ada kelompok pengusaha pribumi yang tertinggal karena tidak mampu mengikuti dinamika pembangunan ekonomi nasional, walaupun banyak juga pengusaha pribumi yang berhasil, dan ini membuat gunung es kecemburuan ekonomi yang sudah berakar lama menjadi makin meluas, celakanya, kecemburuan ekonomi selalu dieksploitir oleh kelompok2 politik tertentu untuk memenuhi hasrat birahi politiknya, yang membuat sentimen anti Tionghoa selalu dimunculkan sesuai agenda politik sesaat mereka.

Ekonomi adalah Bangunan Dasar, Masalah Ekonomi Politik hanya bisa diselesaikan dengan Cara dan Tindakan Politik Ekonomi, atau lebih halus lagi adalah dengan "Kebijakan Politik Ekonomi".

Cara, Tindakan, Kebijakan ini harus bersifat Struktural.

Masalah Ekonomi Politik tidak mungkin bisa diselesaikan dengan Cara Pendekatan Sosial Budaya, bahkan Kepercayaan dan Keyakinan, termasuk agama sekalipun.

Ekonomi sebagai bangunan dasar tentu harus dibangun dengan sasaran kemakmuran bersama, kemakmuran bersama tidak akan terwujud dengan kebencian akibat "psychological imbalance" bersifat rasis! Tentu ini butuh kecerdasan yang bijak dari elit bangsa, bersama "political will" yang kuat dan mendasar, Bukan dengan cara mendiskriminasi dan mendiskreditkan etnis Tionghoa sebagai salah satu elemen bangsa! Sejarah membuktikan, diskriminasi tidak merubah nasib bangsa, apalagi di era globalisasi saat ini.

Di era globalisasi dengan liberalisasi pasar diseluruh dunia ini, arus kapital dengan mudah bisa pergi kemana saja untuk mencari imbal hasil yang lebih menguntungkan, investor terutama investasi sektor riil sangat menjadi rebutan oleh negara2 diseluruh dunia, bahkan negara maju sekalipun! Maka di era globalisasi ini perilaku "memusuhi" dan "mendiskreditkan" pihak pengusaha besar yang kuat entrepreneursip dan

kapitalnya---yang merupakan Mesin dan motor penggerak ekonomi, mesin dan motor pertumbuhan ekonomi, adalah perilaku yang aneh, konyol dan bodoh, perilaku yang sangat irasional! Dan pasti berakibat membuat hancurnya perekonomian nasional itu sendiri! Di era Globalisasi zaman ini, diseluruh dunia, pengusaha2 besar yang memiliki intrepreneursip kuat pasti mendapat tempat yang terhormat didalam negerinya, karena mereka adalah **SEDIKIT DARI JUMLAH ORANG** yang mempunyai kemampuan untuk menjadi Motor dan Mesin Penggerak Ekonomi, sedikit dari jumlah orang yang mampu menciptakan Inovasi2 bisnis, bahkan dinegara sosialis dan komunis pun, orang2 yang sedikit jumlahnya ini yang nota bene adalah full swasta "Kapitalis Besar" seperti Jack Ma di RRT, mendapat tempat khusus dan diajak, didorong, diberi kesempatan luas untuk menciptakan inovasi2 baru, menciptakan Investasi-2 baru.

Maka didalam negeri, ditanah air kita indonesia tercinta ini, Justru kelompok Pengusaha besar yang memiliki Entrepreneursip dan Kapital kuat harus Diajak, Dirangkul, bahkan ditempatkan dalam **KERJASAMA EKONOMI** yang adil untuk dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya, agar terus menjadi Lokomotif dan Mesin Penggerak Ekonomi, Mesin Investasi, Lokomotif dan Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Masalah Ekonomi Politik, masalah kesenjangan dan Kecemburuan Ekonomi ini, didalam sejarah modern Indonesia sudah berakar dan berlangsung Seratus tahun lebih, jauh sebelum Republik ini berdiri.

Hal ini bisa kita telusuri dari lahirnya organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911.

Akar kesadaran politik umat islam di era modern Indonesia dimulai dengan bangkitnya Sarekat Dagang Islam (SDI), kemudian Sarekat Islam (SI), yang kemudian disusul dengan berdirinya berbagai organisasi islam.

Kita semua tau, dan sejarah mencatat bahwa lahirnya SDI adalah didorong dan disebabkan oleh Kecemburuan ekonomi dan Persaingan Dagang antara Pedagang Boemi Poetra dengan Pedagang Tionghoa Peranakan, yg pada saat itu diwarnai dengan berbagai perselisihan, hingga terjadinya kerusuhan di Solo pada th 1912 dan kerusuhan di Kudus pada th 1918.

Kecemburuan ekonomi ini berlangsung terus melewati berbagai periode dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dari masa kebangkitan nasional, melewati masa pergerakan nasional, era proklamasi kemerdekaan, penyerahan kedaulatan RI oleh kolonial Belanda, era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin, Rezim Soeharto, hingga era reformasi hari ini.

Kecemburuan ekonomi makin meningkat bersama dengan tumbuhnya kesenjangan ekonomi yg makin meluas dan melebar. Kesenjangan dan kecemburuan ekonomi melahirkan sentimen tidak suka secara rasial, yang setiap saat bisa bergeser dan disulut menjadi gerakan anti etnis Tionghoa.

Kecemburuan ekonomi dan potensi lahirnya ketidakpuasan sosial adalah dua sisi dari sebuah mata uang, yang merupakan kontradiksi sosial yang akut dinegeri ini, kontradiksi sosial ini yang selalu dimanfaatkan, dieksplorasi, dan dieksploitasi secara politik oleh kelompok kekuatan politik tertentu, terutama disaat kekuatan politik tsb berseberangan dengan pemerintah, menjadi oposisi pemerintah, maka sentimen anti etnis Tionghoa pasti akan dimunculkan dan dimainkan, dikembangkan, untuk memperkeruh kondisi politik, memecah belah bangsa, meledakkan sentimen anti etnis Tionghoa sebagai pemicu lahirnya kerusuhan sosial, yang tujuan dan sasaran akhir adalah untuk menjatuhkan dan menumbangkan pemerintah.

Hari ini kita sudah mencapai pada satu titik keadaan dan kesadaran bersama, keadaan selalu akan melahirkan kesadaran, bahwa masalah kecemburuan ekonomi atau "masalah Tionghoa di Indonesia" sudah waktunya untuk dan harus diselesaikan.

Statement dari tokoh pengusaha etnis Tionghoa dan Filantrop Dato Thahir, yang mengajak semua pengusaha besar untuk menyumbangkan 10% dari aset kekayaannya untuk kepentingan pembinaan masyarakat yang lemah secara ekonomi agar punya kemampuan untuk maju dan mendapat akses ekonomi, sangat jelas menyiratkan kesadaran itu, kesadaran, tuntutan dan kebutuhan mencari solusi "masalah Tionghoa di Indonesia" sudah meluas dikalangan masyarakat etnis Tionghoa dari atas sampai kebawah.

Tampaknya etnis Tionghoa Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat kematangan tertentu untuk mencari solusi penyelesaian masalah sosial ini.

Belajar dari pengalaman masa lalu, mulai dari era demokrasi liberal (1950-1959), Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Kabinet Natsir yang merupakan Program Ekonomi Soemitro Djojohadikusumo, dengan tujuan untuk menciptakan Pengusaha Pribumi, politik ekonomi "Alibaba" kabinet Ali Sastroamidjojo 1, gerakan rasis Asaat, PP-10 1960 di era demokrasi dipimpin Soekarno, Politik Konglomerasi era Soeharto, terakhir masuk ke Fundamentalisme pasar di era reformasi, hingga kini. Sempat kabinet "ICMI" Habibie muncul Adi Sasono dengan politik ekonomi diskriminasi atas nama koperasi, untuk menumbuhkan pengusaha pribumi dengan melarang pedagang etnis Tionghoa memegang jaringan perdagangan distribusi sembilan bahan pokok, yang berakhir dengan raibnya triliunan dana koperasi.

Semua kebijakan politik ekonomi yang bertujuan untuk "menciptakan" dan menumbuhkan kelas pengusaha pribumi diatas telah gagal total.

Juga belajar dari "New Economic Policy" Mahathir Mohammad di Malaysia, yang diakui sebagai upaya yang gagal, Politik Ekonomi Baru Mahathir hanya memberi peluang sebatas pada elit politisi menjadi kaya dengan cara mendapatkan saham pada perusahaan2 publik / IPO, karena hanya elit politisi yang mempunyai akses pada perusahaan besar, tidak dengan rakyat Melayu biasa dan kelas menengah Melayu. New Economic Policy Mahathir memberikan porsi tersendiri berupa peluang usaha sangat luas pada kelas menengah, kelas pengusaha, mereka "diciptakan" dan dirangsang tumbuh dengan mendapat fasilitas bisnis dan perbankan.

Namun setelah Politik Ekonomi Baru ini berjalan sekian lama, pengusaha tangguh dan sukses yang lahir dari etnis Melayu tidaklah banyak, tidak sebanding dengan biaya modal yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada akhirnya pemerintah Malaysia kesulitan lagi membeayai dan menyediakan modal yang dibutuhkan untuk melanjutkan Politik Ekonomi Baru ini.

Walaupun tidak mencapai sasaran, bagaimanapun Politik Ekonomi Baru Mahathir telah memberi manfaat tertentu pada kelas menengah Melayu Malaysia, juga memberi pelajaran pada masyarakat dan pemerintah Malaysia. Seperti diucapkan oleh Mahathir dalam sebuah wawancara, walaupun Politik Ekonomi Baru tidak berhasil, setidaknya dia telah menunjukkan pada rakyat Malaysia bahwa dia telah berbuat dan melakukan sesuatu untuk etnis Melayu Malaysia, dan akhirnya Mahathir pun menganjurkan pada etnis Melayu untuk belajar pada etnis Cina, bahkan menganjurkan anak2 etnis Melayu masuk kesekolahan Cina.

Kegagalan New Economic Policy membuat Mahathir sangat sadar, hanya dengan cara belajar dan ikut terlibat kerja sama dengan pengusaha Cina, magang dengan pengusaha Cina, baru bisa melahirkan pengusaha Melayu yang berhasil. Sistem "magang" adalah kebiasaan dan tradisi pengusaha etnis Tionghoa dalam melakukan regenerasi dan kaderisasi mempersiapkan anak2nya untuk bisa mandiri berdagang sendiri. seperti pepatah bijak orang Amerika, "if you can't be them, why don't you joint them". Dan ini terbukti bahwa generasi kedua dari pengusaha Melayu Malaysia yang mendapat kesempatan bergabung dan magang dengan grup perusahaan besar milik etnis Cina Malaysia seperti YTL Corporation Berhad grup, kini telah berhasil tampil menjadi pengusaha Melayu yang sukses.

Sebuah contoh di era orde baru, dua orang yang sama2 kerabat keluarga Soeharto, yang sama2 memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan, Sudwikatmono yang pakai cara bergabung bersama pengusaha etnis Tionghoa sangat berhasil diberbagai sektor bisnis

dan industri, sukses berkembang menjadi seorang industrialis, namun sebaliknya PS yang dengan cara rasis mengembangkan usaha2 dan perusahaannya, tidak tampak satupun perusahaannya yang berhasil tampil dan eksis dipasar, beliau tidak berhasil menjadi industrialis walau digelontor dengan fasilitas tidak terbatas.

Disamping itu Politik Ekonomi Baru Mahathir juga membuka ruang bagi terjadinya KKN dan perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, antara bisnis dan kekuasaan.

Semua Kebijakan politik ekonomi yg pernah dilakukan dengan tujuan melahirkan, "menciptakan" dan membesarkan "pengusaha pribumi" belum ada yang menunjukkan keberhasilan, dan belum ada contoh yang berhasil. Namun ini tidak berarti bahwa pemerintah bersama kita harus berhenti melakukan perubahan politik ekonomi untuk membina dan menumbuhkan pengusaha pribumi, tidak berarti kita harus berhenti untuk melahirkan dan menumbuhkan klas menengah dan wirausaha wirausaha pribumi.

Yang kita butuhkan adalah menarik semua pelajaran dari pengalaman2 kebijakan politik ekonomi masa lalu, baik pengalaman dari dalam negeri maupun pengalaman dari luar negeri. Menemukan konsep dan Metode untuk menciptakan Hubungan Ekonomi yang memungkinkan terjadinya hubungan Saling Menguntungkan, Saling Ketergantungan, Saling Mengisi, dengan tetap berada dalam Sistem Pasar yang SEHAT dan TIDAK LIAR. Mencari cara dan metode bagaimana melakukan Redistribusi kue pembangunan ekonomi nasional secara adil dan rasional.

Berbagai cara dan Tindakan Afirmatif atau Afirmatif action dapat ditrapkan diberbagai bidang kegiatan ekonomi. Sebagai contoh misalnya pemerintah dapat menetapkan harga dasar cabe merah tiga puluh ribu rupiah per kg, Bulog membeli cabe dari petani dengan harga dasar dan industri makanan diharuskan menerima cabe yang dipasok oleh Bulog, dengan demikian akan terjaga stabilisasi harga cabe yang menjamin keuntungan petani, hingga disaat panen raya harga cabe tidak akan jatuh seperti yang terjadi secara LIAR selama ini, industri makanan pun tidak akan dirugikan, bahkan menjamin lancarnya suply bahan mentah. Disaat harga naik mengikuti harga pasar, disaat kekurangan stok karena faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen, pemerintah membantu pengadaan lewat impor. Demikian pula untuk komoditi pertanian lain2, seperti kacang, jagung, kentang, singkong dll, yang terkait dengan kebutuhan industri makanan.

Sistem melibatkan UKM / pengusaha pribumi masuk dalam jaringan matarantai pasok industri adalah sangat realistis, selalu ada peluang bisnis memasok bahan2 industri, memasok spare parts dan komponen2 lokal dari berbagai industri. Pemerintah harus secara serius dan sungguh2 membina UKM dan wirausaha prbumi untuk dapat meningkatkan kemampuannya menjadi pemasok yang handal. Pihak industri pun

diharuskan secara serius membina pemasok sebagai "anak angkat" agar terjadi saling hubungan yang langgeng dan harmoni.

Tentu terdapat syarat pokok, tindakan Afirmatif ekonomi hanya bisa berhasil dilakukan apabila ada kemauan dan kemampuan pihak2 yang terlibat, terutama sekali adalah kemauan, kemampuan dan kesiapan serta etos kerja dari pihak UKM dan para wirausaha pribumi itu sendiri, tanpa itu tindakan Afirmatif ekonomi akan sia-sia dan gagal.

Pengalaman masa lalu baik di Indonesia maupun di Malaysia menunjukkan, bahwa ada suatu kesamaan sebab kegagalan dari tindakan politik ekonomi itu, yaitu para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah, mereka kurang bisa mandiri untuk mengembangkan usahanya, latar belakang budaya bisnis yang lemah, dll, yang secara keseluruhan dapat disimpulkan atau disebut bahwa era saat itu "pengusaha" pribumi belum siap menerima kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa era diperiode itu tingkat Perkembangan Masyarakat belum matang untuk kelahiran klas menengah dan pengusaha atau klas borjuis pribumi, maka upaya yang dipaksakan untuk "menciptakan" klas pengusaha pribumi pun mengalami kegagalan.

Disini Tingkat Perkembangan Masyarakat yang belum matang adalah satu keadaan dimana Tingkat TENAGA PRODUKTIF Masyarakat belum cukup berkembang, atau belum berkembang sampai ketinggian tertentu. Untuk dapat memenuhi syarat2 ekonomi guna menggantikan HUBUNGAN PRODUKSI Lama, Maka tindakan untuk memaksa mengubah Hubungan Produksi lama dimana Tenaga Produktif belum siap atau Tenaga Produktif belum berkembang sampai tingkat tertentu, adalah tindakan konyol dan bodoh, itu merupakan tindakan melawan hukum ekonomi dan hukum perkembangan masyarakat, yang pasti akan mengalami kegagalan.

Prasyarat mutlak untuk melahirkan klas menengah, klas pengusaha, atau disebut klas borjuis (pribumi) adalah terjadinya Industrialisasi secara luas dan masif, yang membawa serta maju berkembangnya perdagangan arus barang, seperti lahirnya klas borjuis di Eropa pasca revolusi industri. Oleh karena itu "menciptakan" klas menengah, klas pengusaha atau klas borjuis (pribumi) disaat latar belakang Perkembangan Masyarakat belum mencapai industrialisasi adalah upaya sia-sia. Ini merupakan Hukum Perkembangan Masyarakat. Semua upaya dan tindakan yang melawan Hukum Perkembangan Masyarakat pasti berakhir dengan kegagalan, karena Hukum Perkembangan Masyarakat adalah KEHARUSAN SEJARAH dari Perkembangan Masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu untuk melaksanakan tindakan Afirmatif ekonomi diperiode era kini, 60 tahun setelah Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Politik Ekonomi "Alibaba" serta PP-10, terlebih dulu pemerintah dituntut memiliki komitmen dan kemauan politik yang keras: hadir, membina, mengawasi, dan menjadi pusat komando dari tindakan Afirmatif

ekonomi. Kemauan politik yang keras dan tindakan yang disiplin akan membuat otoritas pemerintah menjadi efektif dalam melaksanakan tindakan politik ekonomi, melaksanakan program afirmatif ekonomi. Masuk dan intervensi kedalam Jaringan Matarantai Perdagangan dan Produksi untuk menumbuhkan wirausaha wirausaha masyarakat khususnya wirausaha-wirausaha pribumi secara luas.

Perlu diketahui bahwa Tingkat Perkembangan Masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat berbeda dibanding 30 tahun apalagi 60 tahun lalu. selama 30--60 tahun ini Tingkat Perkembangan Masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi besar, tingkat perkembangan masyarakat indonesia saat ini sudah mencapai tingkat kematangan tertentu untuk lahirnya Klas Menengah baru dan Wirausaha2 pribumi. tingkat Perkembangan Masyarakat yang lebih maju akan membawa perubahan Sifat Masyarakat menjadi lebih maju pula. 32 tahun rezim Soeharto dengan liberalisasi ekonomi, membawa segi positif tumbuhnya industri dan perdagangan secara pesat, yang membawa serta lahir dan tumbuhnya klas menengah ditanah air, tumbuh usaha2 dan pengusaha baik kecil, menengah dan besar di-kota2 besar sampai pinggiran kota2 kecil ditingkat kecamatan dan Kelurahan, tumbuh daerah2 urban baru. Ditambah 20 tahun era reformasi dengan Fundamentalisme pasar, telah membongkar belenggu monopoli, menciptakan kondisi kebebasan berusaha, menciptakan ruang untuk berkembang tanpa hambatan bagi pengusaha baik kecil, menengah dan besar. Namun disisi lain pemerintah dituntut melakukan intervensi untuk menjaga agar rezim Fundamentalisme pasar tidak berkembang menjadi liar dan membuat kesenjangan ekonomi makin mendalam.

Ditingkat Perkembangan Masyarakat Indonesia saat ini, dapat kita lihat pula terjadinya perubahan Sifat Masyarakat yang lebih maju. Hari ini kita dapat menyaksikan telah tumbuh klas menengah pribumi secara luas, kita saksikan tiap keluarga didesa rata2 punya dua buah Sepeda motor, kita saksikan banyaknya juragan2 dipinggiran kota2 kecil dan desa yang memiliki beberapa buah truk sebagai alat kerja untuk mendukung usahanya, dikota kecil pinggiran, didaerah urban baru tumbuh banyak UKM dan wirausaha pribumi yang memiliki aset modal 500juta - 2Milyar rupiah. Di kota2 sangat banyak pengusaha dengan aset 1-5 milyar rupiah, 5-25 milyar rupiah, 25-50 milyar rupiah, 50-100 milyar rupiah. Diluar Jawa, mudah kita jumpai usahawan2 lokal yang memiliki kebun sawit 5-10 Ha, 10-50 Ha, 50-100 Ha, 100-500 Ha.

Tumbuhnya klas menengah, UKM, dan wirausaha2 pribumi yg luas telah mengubah budaya kerja masyarakat, mereka menciptakan usaha dan kerja sendiri tanpa bantuan dan bimbingan dari pemerintah sama sekali, pengalaman tahun 1998 saat negara dilanda krisis ekonomi, dimana UKM dan pelaku ekonomi non formal berperan secara auto pilot mempertahankan kehidupan ekonomi masyarakat adalah sebuah contoh UKM dan usaha2 non formal sudah sangat eksis ditanah air. Mereka rajin dan giat mencari peluang usaha

sendiri. Watak rajin, kerja keras, hemat, ingin maju dan sejahtera ini sangat tampak dan mulai terbentuk lewat praktek kerja dan usaha mereka selama 20-30 tahun ini, tumbuhnya semangat wira-usaha dari pengusaha2 pribumi ini sudah seharusnya ditangkap oleh pemerintah untuk dikembangkan, saat ini mereka sangat membutuhkan bantuan sebuah Cetak Biru Peta Jalan dan Kesempatan untuk masuk kedalam Jaringan Matarantai Perdagangan dan Produksi, untuk menjadi bagian dari Jaringan Matarantai Perdagangan dan Produksi secara nasional, agar dapat membuat usahanya bisa berkembang, dan ini juga merupakan kesempatan pemerintah guna menumbuhkan UKM dan wirausaha pribumi yang handal dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Lahir dan tumbuhnya klas menengah secara luas ditingkat Perkembangan Masyarakat Indonesia saat ini juga diikuti dengan terbentuknya etos kerja wirausahawan2 pribumi, yang makin membentuk budaya kerja dan usaha. Klas menengah yang berkembang luas akan menjadi kekuatan pendorong kemajuan masyarakat Indonesia dan menjadi Kekuatan Perubahan.

Kondisi dan karakter klas menengah dan wirausahawan2 pribumi yang tumbuh didalam masyarakat Indonesia saat ini sudah berbeda dengan karakter pengusaha2 pribumi di era tahun 1950-70an, yang sangat tergantung pada pemerintah, tidak mandiri, tidak memiliki budaya bisnis dan tidak mempunyai etos kerja. Saat ini mereka sudah siap menerima kesempatan untuk berkembang, maka sudah waktunya pemerintah turun tangan mengambil kebijakan dan Tindakan Politik Ekonomi untuk membuat mereka bisa masuk kedalam jaringan matarantai perdagangan dan produksi, untuk melahirkan wirausaha wirausaha pribumi yang tangguh dan handal.

32 tahun rezim liberalisasi ekonomi Soeharto dan 20 tahun fundamentalisme pasar era reformasi telah menghasilkan kemajuan ekonomi yang tidak berimbang, index gini mencapai 0.4, Laporan Bank Dunia 15 Desember 2015 menyebutkan 74% lahan perkebunan dikuasai 0.2% penduduk, termasuk contoh penguasaan 5 juta Ha lahan perkebunan oleh taipan yang dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Ombudsman mengungkapkan penguasaan dan kepemilikan lahan perkebunan di Indonesia saat ini dipegang hanya oleh segelintir orang atau 0.2% penduduk, terutama sekali oleh perusahaan2 besar perkebunan. Komnas Ham menyebutkan Sinar Mas grup menguasai 5 juta Ha lahan perkebunan, Komnas Ham juga menunjuk di Indonesia 0.2% penduduk menguasai 74% lahan perkebunan, Indonesia merupakan negara paling ekstrem dalam ketimpangan distribusi lahan. KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) menyebutkan 35% daratan Indonesia berada didalam areal yang dikuasai 1.194 Pemegang Kuasa Pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan, 257 Kontrak Pertambangan Batubara. Tentu kebenaran akan data2 tsb perlu kita validasi dengan data yang ada di pemerintah.

Penguasaan lahan perkebunan oleh perusahaan<sup>2</sup> besar itu adalah karena pemberian konsesi dari pemerintah, dan pemberian konsesi lahan tsb diberikan secara "gratis", pengusaha tidak dikenakan kewajiban membayar harga atau nilai komersial dari lahan tsb atau membayar kompensasi sewa atas pemakaian lahan tsb, pengusaha hanya diwajibkan membayar biaya pengurusan administratif seperti biaya pengukuran dsb. Padahal disaat proses pengurusan administrasi perizinan, lahan tsb sudah memiliki nilai komersial yang sangat tinggi.

Saat ini para pengusaha pemegang konsesi lahan yang diberikan oleh pemerintah itu telah berhasil masuk dalam daftar orang<sup>2</sup> terkaya di Indonesia.

Maka sudah sepantasnya dan tidak berlebihan apabila setelah satu generasi umur tanaman (satu generasi kelapa sawit +/- 25 th, sama dengan masa umur HGU), bersamaan dengan habis masa berlakunya HGU, lahan tsb ditarik kembali oleh pemerintah dan diadakan evaluasi kembali, dimana nilai lahan tsb dikompensasikan pada saham perusahaan, pemerintah harus mengambil posisi saham mayoritas. Sedang pengalaman dan kemampuan managerial serta akses pasar dari pengusaha bisa tetap berperan untuk mengembangkan perusahaan tsb. Pemerintah dapat menggunakan saham yang dikuasai untuk melakukan redistribusi kekayaan yang melibatkan masyarakat, menjadikan saham perusahaan bersifat publik. Bagaimana model mekanisme yang tepat dalam melakukan redistribusi kekayaan yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat, menjadi tugas pemerintah dan pakar<sup>2</sup> ekonomi serta pakar<sup>2</sup> lintas disiplin ilmu untuk merumuskan.

Sebaliknya kesediaan dan dukungan pengusaha besar dalam berpartisipasi untuk melaksanakan tindakan politik ekonomi dari pemerintah juga harus mendapat penghargaan dan tempat yang layak dan adil. pemerintah dapat menempatkan mereka dalam kerjasama baru menciptakan investasi baru dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Demikian pula dalam sektor pertambangan dan konsesi lain<sup>2</sup>, tentu modelnya akan berbeda karena sifat dan cara produksinya berbeda.

Terhadap modal asing dan kontrak karya yang mendapat konsesi dari pemerintah, kita dibatasi oleh hukum internasional, Penguasaan kembali Blok Mahakam setelah habis waktu kontrak karya dan negosiasi Kepemilikan 51% Saham Freeport oleh Pemerintah RI adalah contoh yang tepat, selain itu adanya peluang<sup>2</sup> lain harus terus digali oleh pemerintah, peluang kemungkinan negosiasi ulang bagi kontrak karya yang tidak adil dan tidak sesuai lagi dengan kondisi pasar serta perkembangan kini harus diupayakan oleh pemerintah. CSR yang tidak memadai harus ditinjau kembali dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal perusahaan publik pemerintah dapat mencari model kepemilikan saham dengan mempelajari pengalaman Malaysia, dan membuang segi2 negatifnya. Bertahap membuat saham perusahaan publik benar2 dimiliki oleh publik.

Sebaliknya peran dan kemampuan pengusaha besar dalam menggerakkan ekonomi harus mendapatkan tempat yang layak dan adil, diadopsi dan dimaksimalkan oleh pemerintah untuk melakukan kerjasama, barangkali perlu dipertimbangkan untuk membentuk perusahaan patungan bersama antara pengusaha besar dengan BUMN, terutama termasuk pengusaha besar etnis Tionghoa, untuk membuka investasi2 baru, membuka konsesi baru, misalnya membangun industri dasar, membangun rice estate, food estate dll, sesuai dengan cetak biru pembangunan ekonomi nasional, dengan kompensasi dukungan penuh dari pemerintah baik penyediaan konsesi lahan maupun akses permodalan secara adil atas dukungan yang telah diberikan pengusaha besar terhadap kebijakan politik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Agar kebijakan dan tindakan politik ekonomi dari pemerintah bisa berjalan secara adil dan berimbang, saling menguntungkan semua pihak, termasuk kepentingan pengusaha besar, membuat semua pelaku ekonomi dari atas sampai paling bawah, dari pengusaha besar sampai UKM bisa terlibat dan berjalan bersama secara harmoni, adil dan rasional.

Dengan demikian seluruh potensi ekonomi nasional, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam di Indonesia dapat digerakkan untuk kebangkitan ekonomi negara. Kelompok yang memiliki Entrepreneursip dan kapital kuat, dalam hal ini semua pengusaha besar termasuk terutama pengusaha besar etnis Tionghoa dapat bersama-sama pemerintah mengembangkan potensi dan kemampuannya tanpa belenggu apapun, secara maksimal, menjadi kekuatan pelopor dan Lokomotif, menjadi motor dan mesin penggerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu sudah saatnya bangsa ini untuk mencari sebuah formula KESEPAKATAN NASIONAL untuk MENYATUKAN PANDANGAN KABANGSAAN BERSAMA, melepas dan membongkar semua belenggu yang telah membelenggu kekuatan dan energy bangsa ini, termasuk belenggu rasisme, menata kembali struktur ekonomi politik agar menjadi sehat, berimbang, adil dan rasional, maka ekonomi sebagai bangunan dasar dapat menjadi sarana dan alat untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, mencapai negara kesejahteraan bersama yang adil dan beradab.

Tercapainya hal2 tsb diatas dan lepasnya belenggu yang selama ini membelenggu bangsa kita, maka energy bangsa Indonesia akan terbebas dan meledak menjadi kekuatan pembangunan ekonomi yang dahsyat! Tidak sulit bagi Indonesia dengan kekayaan alam yang dimiliki dan populasi penduduk yang besar untuk masuk dalam jajaran lima besar ekonomi dunia! Itu adalah masa depan bangsa Indonesia yang sebenarnya!

Masihkah kita mau dibawa berhenti terus menerus dipersimpangan jalan kegaduhan politik? Kegaduhan rasis yang hanya mengabdikan pada kepentingan sesaat segelintir kelompok politik?

Sejarahpun sudah membuktikan bahwa cara-cara Rasis dan fasis yang melawan hukum ekonomi, hanya akan menuju anarkisme dan membawa bangsa menuju kehancuran!

Tercapainya kesepakatan nasional akan membawa kita siap pada visi dalam era persaingan global didalam arus globalisasi pasar dunia yang makin sengit, untuk merebut peluang dan memenangkan persaingan global.

Sudah saatnya pemerintah bersama semua komponen bangsa membuat kesepakatan nasional atau konsensus nasional, untuk mengambil tindakan politik ekonomi guna memperbaiki ekonomi politik yang tidak berimbang sepanjang sejarah republik ini, menciptakan ruang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan wirausaha pribumi. Kelas menengah dan wirausaha yang berkembang adalah kekuatan pendorong perkembangan masyarakat, dan kekuatan pelaku perubahan.

Tiba saatnya pemerintah untuk mengambil langkah-cara kongkrit, melibatkan seluruh komponen bangsa, elit politik, pakar-cara ekonomi dan pakar-cara lintas disiplin ilmu, tokoh-cara dan wakil masyarakat, para pelaku ekonomi, pelaku usaha dari semua bidang dan semua lapisan, pengusaha-cara besar, asosiasi-cara dagang dan industri, perbankan dll, guna mencapai sebuah Kesepakatan atau konsensus nasional untuk mengakhiri kondisi dan struktur ekonomi politik yang tidak berimbang, mengakhiri akar dan masalah kecemburuan ekonomi, menata kembali struktur hubungan ekonomi masyarakat.

Karena menyangkut kesepakatan nasional, kesepakatan seluruh elemen bangsa, maka sebelum masuk pada kebijakan dan tindakan politik ekonomi, tentulah pemerintah harus siap dengan konsep politik ekonomi yang akan dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah dan semua pihak terkait dituntut keterbukaan dan kejujuran, harus secara transparan dibuka data-cara dari seluruh potensi ekonomi nasional, potensi sumber daya alam. Dibuka semua Struktur kepemilikan dari semua konsesi-cara, segala jenis sektor tambang dan migas, lahan kehutanan, pertanian, lahan perkebunan, kelautan, dll. Baik dari Perusahaan modal asing maupun modal dalam negeri. Struktur Aset seluruh BUMN, Struktur Aset seluruh perusahaan Asing, Struktur Aset seluruh Perusahaan Nasional.

Dari semua itu dapat disimpulkan dari mana politik ekonomi akan dimulai, berapa besaran redistribusi aset yang bisa dilakukan, juga sangat penting sekali untuk mengetahui dengan sebenarnya dan sejujurnya, secara transparan, berapa jumlah prosentase porsi ekonomi dari masing-cara pelaku usaha, berapa prosen porsi perusahaan modal asing, berapa prosen porsi BUMN, berapa prosen porsi pengusaha nasional. Dari porsi pengusaha atau

perusahaan nasional ini berapa persen milik WNI etnis Tionghoa, hingga bisa diketahui dengan sebenarnya secara transparan prosentase aset perusahaan milik WNI etnis Tionghoa terhadap seluruh bobot aset perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk modal asing dan BUMN.

Selama ini selalu dihembuskan, digemborkan dan dimitoskan bahwa ekonomi Indonesia dikuasai oleh etnis Tionghoa, ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 80% dikuasai etnis Tionghoa, sehingga setiap menyebut "Tionghoa" akan dimaknai sebagai "menguasai ekonomi Indonesia" secara negatif. Disisi lain ada tokoh pengusaha etnis Tionghoa memberikan data dalam diskusi Kompas, bahwa prosentase Aset Perusahaan Nasional Indonesia adalah berkisar antara 20-25% dari total seluruh Aset Perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk Aset Perusahaan Asing dan BUMN, dan dari 20-25% Perusahaan Nasional tsb Perusahaan yg dimiliki oleh etnis Tionghoa sekitar 70%, maka total bobot prosentasi Perusahaan yg dimiliki oleh etnis Tionghoa terhadap Aset seluruh Perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN dan modal perusahaan asing, adalah sebesar dalam kisaran 14-17.5% Bukan 70-80% seperti yang selalu dihembuskan dan digemborkan oleh kelompok2 tertentu yang selalu mengeksploitasi kebencian etnis dan Sara untuk tujuan politik sesaat mereka.

Dari data Kementerian ESDM dapat dibaca bahwa 75% sektor tambang dan Migas, Kuasa Pertambangan dikuasai perusahaan modal asing.

Harian Tempo tgl 25 Januari 2017 merelease data BKPM dan mengungkapkan realisasi investasi sepanjang tahun 2016 mencapai 612.8 triliun rupiah, naik dibanding th 2015 yakni sebesar 545.4 triliun rupiah.

Dari total realisasi investasi tsb realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) th 2016 adalah sebesar 216.2 triliun rupiah, naik dibanding th 2015 yakni sebesar 179.5 triliun.

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) th 2016 adalah sebesar 386.4 triliun rupiah, naik dibanding th 2015 yakni sebesar 365.9 triliun rupiah.

Dari data tsb dapat dihitung bahwa porsi investasi perusahaan modal asing adalah sebesar 63%, sedang porsi investasi perusahaan modal dalam negeri 37%, data selama tahun2 lampau juga menunjukkan prosentase yang tidak jauh berbeda, wajar bila berfluktuasi sesuai kondisi pasar dunia. Dari data tersebut dapat memberi gambaran kira2 porsi prosentase aset investasi perusahaan modal asing berkisar sebesar 63%, dan porsi aset investasi perusahaan nasional berkisar sebesar 37%. Tentu validasi data yang benar harus dibuka secara transparan oleh pemerintah.

Total Aset 118 BUMN pada th 2016 tercatat sebesar 6.325 triliun rupiah.

Sedang disektor Keuangan dan moneter, peran modal nasional sangat kecil dibanding modal asing, ini dapat dilihat bahwa sektor moneter kita sangat rentan dalam menghadapi goncangan2 yang ditimbulkan oleh pemain2 spikulan modal global. Disinipun juga dituntut teransparansi data dari pemerintah.

Dari data2 tsb diatas tidak sulit untuk mendapat gambaran berapa kira2 porsi prosentase aset perusahaan BUMN, berapa kira2 porsi aset perusahaan modal asing, dan berapa pula porsi aset perusahaan nasional, dan tidak sulit pula untuk memdapat gambaran berapa kira2 porsi aset prosentase perusahaan2 nasional yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Namun sekali lagi, validasi data yang benar harus dibuka secara transparan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan tidak menjadi korban serta mudah terseret dalam arus emosi sentimen rasis yang selalu akan ditimbulkan oleh kelompok politik tertentu demi kepentingan sesaat mereka.

Harus dicatat pula bahwa perusahaan2 milik WNI etnis Tionghoa adalah bagian dari perusahaan2 nasional, pengusaha2 WNI etnis Tionghoa adalah bagian dari pengusaha nasional, Modal atau kapital perusahaan milik WNI etnis Tionghoa adalah Modal atau kapital Domestik, akumulasi kapital mereka akan di-deversifikasi dalam berbagai investasi didalam negeri, hal ini sangat tampak dan sangat jelas dalam ekspansi usaha mereka, dari perdagangan berkembang ke industri, dan berkembang ke properti, berkembang lagi kesektor perkebunan, berkembang terus ke-sektor2 lain. Dari perusahaan biasa berkembang menjadi Holding Company. Inilah yang membedakan sifat modal domestik dengan modal asing yang melakukan repatriasi hasil keuntungan usaha. Karena habitat modal domestik adalah didalam negeri indonesia, kalau ada pengusaha nasional termasuk WNI etnis Tionghoa melakukan investasi diluar negeri, itu lebih bersifat ekspansi mencari pasar dan sumber daya bagi perusahaan2nya didalam negeri di-tengah2 arus globalisasi.

Dengan dibukanya semua data secara transparan, pemerintah dapat secara tepat sasaran dalam melakukan kebijakkan dan tindakan politik ekonomi, tepat sasaran dalam melaksanakan redistribusi hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan rasional.

Semua pihak dituntut memiliki kesadaran berbangsa, kesadaran kesatuan bangsa, kesadaran untuk penting bersama seluruh bangsa, semua harus terbuka, didasari ketulusan dan kejujuran berbangsa, untuk mencapai Integrasi Nasional secara utuh dan keseluruhan, ini adalah makna dari revolusi mental, makna dari amanat bangsa yang merdeka, bermartabat dan beradab.

Bagaimana sikap INTI terhadap "masalah Tionghoa" yang muncul dari waktu ke waktu dalam bentuk gerakan2 anti etnis Tionghoa, bagaimana pemikiran2 INTI dan bagaimana langkah2 kongkrit yang dilakukan INTI terhadap masalah Tionghoa di Indonesia, dan

lain-lain serentetan masalah, kemampuan dan kemauan INTI dalam mengemban tugas sejarah bangsa ini dinanti oleh masyarakat, terutama masyarakat Tionghoa Indonesia.

Januari 2018.

Setro.